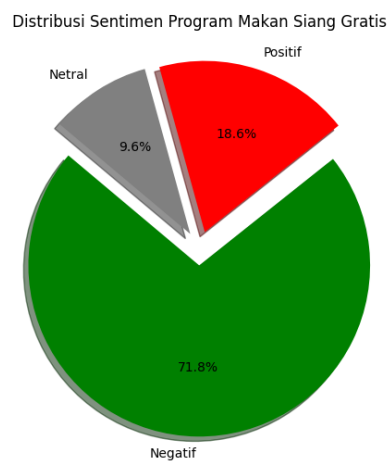


BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selepas dilaksanakan klasifikasi data dan proproses maka didapat hasil yang akan divisualisasi menjadi beberapa jenis yaitu pie chart dan word cloud. Selengkapnya dijabarkan berikut:

3.1. HASIL



Gambar 1. Diagram Hasil Klasifikasi Sentimen

Berdasarkan hasil analisis sentimen terhadap 657 tweet mengenai Program Makan Siang Gratis menunjukkan bahwa persepsi publik di platform X (Twitter) didominasi oleh pandangan yang negatif. Dengan proporsi sentimen negatif sebesar 71,8%, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan kritis atau menyuarakan ketidakpuasan terhadap implementasi atau konsep program tersebut. Sementara itu, hanya 18,6% tweet yang menunjukkan sentimen positif, menandakan bahwa dukungan terhadap program ini masih tergolong rendah. Adapun 9,6% tweet bersifat netral, yang menunjukkan adanya sebagian kecil pengguna yang hanya memberikan informasi atau opini tanpa ekspresi emosional yang kuat. Temuan ini mencerminkan perlunya

pengalaman langsung atau kajian analitis yang kuat, melainkan sekadar respons emosional terhadap ide program itu sendiri. Tingginya frekuensi kata gratis bisa memiliki makna ganda. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menghargai bentuk intervensi sosial yang meringankan beban ekonomi. Namun di sisi lain, hal ini juga dapat mencerminkan ketergantungan atau ekspektasi tinggi terhadap program pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari sekolah, orang tua, atau komunitas lokal. Oleh karena itu, meskipun sentimen positif menunjukkan penerimaan awal yang baik, masih diperlukan pendekatan evaluatif yang lebih menyeluruh agar kebijakan ini dapat berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.



Gambar 3. Word Cloud Negatif

Analisis terhadap word cloud sentimen negatif memperlihatkan bahwa kata-kata yang paling sering muncul seperti makan, siang, gratis, dan rakyat tidak hanya menunjukkan topik utama dari diskusi publik, tetapi juga memuat kecenderungan kritik dan ketidakpercayaan. Walaupun istilah makan siang gratis juga ditemukan dalam word cloud sentimen positif, dalam konteks negatif kata-kata tersebut lebih sering dikaitkan dengan keraguan terhadap efektivitas program, potensi penyalahgunaan anggaran, dan pelaksanaan yang dinilai tidak merata. Kata rakyat yang dominan dalam konteks ini memperlihatkan adanya persepsi bahwa program ini tidak sepenuhnya dirancang untuk kepentingan masyarakat, melainkan dianggap sebagai kebijakan populis yang lebih mengedepankan pencitraan. Kritik ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap pengalaman kolektif masyarakat terhadap program-program pemerintah sebelumnya yang tidak jarang gagal dalam implementasi atau tidak tepat sasaran. Ketiadaan istilah seperti gizi, anak, atau sekolah dalam word cloud sentimen negatif menunjukkan bahwa kritik lebih diarahkan pada aspek pengelolaan dan

sentimen netral memainkan peran penting sebagai ruang refleksi rasional dan pengumpulan informasi yang potensial menjadi titik awal perubahan sikap publik, baik ke arah positif maupun negatif, tergantung pada informasi yang mereka terima berikutnya. Interpretasi ini juga menunjukkan bahwa kelompok dengan sentimen netral masih terbuka terhadap pengaruh komunikasi kebijakan. Artinya, apabila pemerintah mampu menyampaikan informasi dengan jelas, transparan, dan berbasis data, maka kelompok netral ini memiliki potensi besar untuk bergeser ke arah dukungan yang lebih kuat. Sebaliknya, jika komunikasi pemerintah dianggap tidak konsisten atau tidak menjawab kebutuhan publik, kelompok ini pun berisiko beralih ke posisi skeptis.

3.2. PEMBAHASAN

Hasil analisis sentimen terhadap 657 tweet terkait Program Makan Siang Gratis menunjukkan dominasi sentimen negatif yang signifikan, dengan persentase lebih dari 70%. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan sosial. Meskipun program ini memiliki misi yang secara substansi sangat mulia, yakni menjamin asupan gizi peserta didik melalui pemberian makan siang secara gratis, namun respons publik di media sosial memperlihatkan adanya resistensi yang kuat. Resistensi ini tampaknya tidak semata-mata ditujukan pada esensi program, melainkan pada keraguan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam mengeksekusi kebijakan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. Dominasi sentimen negatif ini juga sejalan dengan hasil penelitian Dharmendra yang mengungkapkan bahwa program bantuan pendidikan seperti KIP-Kuliah pun mendapat respon negatif dari publik, utamanya karena isu birokrasi yang rumit, ketidakjelasan distribusi, dan keterbatasan akses informasi.[15] Fenomena serupa ditemukan dalam analisis sentimen terhadap kebijakan Tapera yang diteliti oleh Rohmania & Abidin di mana 86% sentimen masyarakat terhadap program perumahan tersebut bernada negatif. Studi ini menyimpulkan bahwa opini negatif lebih sering mencuat karena minimnya transparansi dan kurangnya pelibatan publik dalam proses kebijakan.[16] Secara sosiologis, ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dapat dijelaskan melalui teori defisit kepercayaan (trust deficit), yaitu kondisi ketika masyarakat mengalami kekecewaan berulang terhadap program pemerintah, sehingga merespon kebijakan baru dengan skeptisisme.[17] Dalam

konteks media sosial, teori spiral of silence juga relevan untuk menjelaskan mengapa opini negatif lebih cepat menyebar dibandingkan opini positif. Ketika sentimen negatif menjadi dominan, maka pengguna yang memiliki pandangan netral atau positif cenderung menahan diri untuk menyampaikan pendapatnya, karena khawatir menjadi minoritas atau tidak didengarkan. Kata-kata yang muncul dalam word cloud seperti makan, siang, gratis, dan rakyat pada sentimen negatif juga mencerminkan bahwa kritik publik lebih diarahkan pada aspek teknis dan politik dari kebijakan ini. Tidak munculnya kata-kata seperti gizi, anak, atau kualitas menunjukkan bahwa masyarakat belum cukup melihat dampak langsung dari program tersebut terhadap tujuan kesehatan dan pendidikan anak. Sebaliknya, publik lebih fokus pada potensi masalah seperti politisasi, pemborosan anggaran, atau ketidaksiapan infrastruktur pelaksana.[18]

Dalam kondisi seperti ini, respons negatif masyarakat menjadi semacam mekanisme proteksi sosial terhadap kebijakan yang dianggap memiliki potensi gagal seperti beberapa program sebelumnya.[19] Maka dari itu, untuk meredam resistensi publik, pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi kebijakan yang lebih partisipatif dan transparan. Pemberian informasi secara berkala, pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi, serta pelaporan hasil implementasi yang dapat diakses publik akan memperkuat legitimasi program dan mengurangi potensi distorsi informasi. Sentimen negatif tidak selalu berarti penolakan total, tetapi bisa menjadi sinyal awal yang konstruktif apabila ditangkap sebagai kritik untuk perbaikan sistemik.